



BADAN PUSAT STATISTIK

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT 2020-2024



SUBDIREKTORAT STATISTIK RUMAH TANGGA
SUBDIREKTORAT STATISTIK PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
SUBDIREKTORAT STATISTIK KESEHATAN DAN PERUMAHAN

Kata Pengantar

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang merupakan penjabaran dari tujuan, visi dan misi Renstra Badan Pusat Statistik dan Renstra Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2020-2024. Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di bidang statistik rumah tangga, statistik pendidikan dan kesejahteraan sosial serta statistik kesehatan dan perumahan, khususnya dari aspek akurasi data yang dihasilkan dan kecepatan penyajian data.

Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat ini disusun berdasarkan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis yang terjadi di BPS serta agenda *Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics (Statcap-Cerdas)*. Penyusunan Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat disusun mengakomodir dan menyesuaikan perubahan struktur organisasi serta tugas dan fungsi unit kerja berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas masukan dan partisipasi aktifnya dalam proses penyusunan Renstra ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat bersama-sama mewujudkan visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yaitu “**Penyedia Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Berkualitas untuk Indonesia Maju**”. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Juli 2020

Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat



Gantjang Amannullah



Ringkasan Eksekutif

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyediakan data dan informasi statistik Kesejahteraan Rakyat yang meliputi statistik rumah tangga, statistik pendidikan dan kesejahteraan sosial serta statistik kesehatan dan perumahan. Dalam melaksanakan kegiatannya, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat melakukan pengumpulan data berupa survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat adalah **“Penyedia Data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas untuk Indonesia Maju”** untuk mendukung visi Deputy Bidang Statistik Sosial. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut diwadahi dalam sebuah program teknis yaitu **“Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)”** dengan 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Rumah Tangga.
2. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial.
3. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesehatan dan Perumahan.

Tujuan dan Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagai upaya guna mendukung upaya pencapaian visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2024 yaitu **“Penyedia Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Berkualitas untuk Indonesia Maju”** adalah:

1. Tujuan 1: Menyediakan data statistik kesejahteraan rakyat untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan:
Misi ke-1: Menyediakan statistik kesejahteraan rakyat berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.
2. Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang kesejahteraan rakyat, terkait dengan:
Misi ke-2: Membina Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi terkait bidang statistik kesejahteraan rakyat melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan.
3. Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang kesejahteraan rakyat, terkait dengan:
Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik kesejahteraan rakyat untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.
4. Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, terkait dengan:
Misi ke-4: Membangun sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020–2024 tersebut akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan di Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat untuk mewujudkan visi **“ Penyedia Data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas untuk Indonesia Maju”**.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	v
Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum.....	2
1.1.1 Pencapaian Umum Visi Direktorat Statistik Kesra 2015-2019.	3
1.1.2 Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kesra 2015-2019.	5
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	6
Bab II. Visi, Misi, dan Tujuan	13
2.1 Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	14
2.2 Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	15
2.3 Tujuan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	19
2.4 Sasaran Strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	21
Bab III. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagan.....	27
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Statistik Sosial	27
3.1.1 Arah kebijakan dan Strategi.....	27
3.1.2 Program dan Kegiatan.....	33
3.1.3 Prioritas Nasional.....	34
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	35
Bab IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	41
4.1 Target Kinerja.....	41
4.2 Kerangka Pendanaan.....	43
Bab V. Penutup	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.2 Potensi dan Permasalahan

Bab I. Pendahuluan

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, sistem perencanaan pembangunan nasional berarti satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/RPJPN Tahun 2005-2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN Tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020), serta dijabarkan dalam rencana pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat membangun rencana kinerja tahunan yang merupakan penjabaran dari hasil yang ingin dicapai selama periode 5 (lima) tahun dimana tertuang dalam rencana strategis (Renstra) Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2024 disusun selaras dengan visi pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur yang ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing tinggi. Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat disesuaikan juga dengan visi RPJMN 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Selanjutnya Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat memperhatikan visi Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju.

Komponen Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2024 disusun meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang tentunya selaras dengan tugas dan fungsi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam penyediaan data dan informasi statistik kesejahteraan rakyat yang berkualitas. Substansi Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat mempertimbangkan Renstra Badan Pusat Statistik 2020-2024. Selanjutnya, sasaran dan target pembangunan pada Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat memperhatikan evaluasi target dan capaian Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015-2019.

1.1 Kondisi Umum

Kondisi umum Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015-2019 tercermin dari dokumentasi capaian target dan realisasi Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015-2019. Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015-2019 disusun guna memberikan arah dan sasaran yang jelas sekaligus sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019. Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015-2019 tentunya juga selaras dengan Renstra Badan Pusat Statistik 2015-2019.

Dalam menjalankan tugas di bidang perstatistikan nasional, visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015-2019 sebagai upaya mewujudkan tugas pokok dan fungsi organisasi adalah “Pelopor Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Terpercaya untuk Semua”. Visi tersebut selaras dengan Visi Kedepujian Statistik Sosial 2015-2019 yaitu “Pelopor Data Statistik Bidang Sosial yang Terpercaya untuk Semua” juga merujuk pada visi Badan Pusat Statistik 2015-2019 yaitu “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”.

Guna mewujudkan visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015-2019, berbagai kebijakan Direktorat Kesejahteraan Rakyat diarahkan untuk mendukung target-target dalam jangka waktu yang lebih singkat berupa misi. Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat mencakup 3 (tiga) tugas yang berkesinambungan, yaitu:

1. Menyediakan data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional, dan internasional.
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang Statistik Kesejahteraan Rakyat.
3. Membangun insan statistik yang kompeten di Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Upaya pencapaian visi dan misi juga didukung dalam penjabaran tujuan-tujuan yang memberikan arahan yang jelas. Pencapaian tujuan akan berkontribusi dalam memenuhi misi dan mewujudkan

visi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Peningkatan kualitas data Statistik Kesejahteraan Rakyat melalui kerangka penjaminan kualitas.

Tujuan 2: Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Selanjutnya ditetapkan 3 (tiga) sasaran sebagai penjabaran untuk mencapai tujuan secara lebih nyata. Sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat adalah:

Sasaran 1: Tersedianya Data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas.

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Sumber Data (*respondent engagement*).

Sasaran 3: Meningkatnya Hubungan dengan Pengguna Data.

1.1.1 Pencapaian Umum Visi Direktorat Statistik Kesra 2015-2019.

Pencapaian Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015-2019 yaitu “Pelopor Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Terpercaya untuk Semua”, secara umum dapat disimpulkan berdasarkan hasil Survei Kebutuhan Data (SKD) 2019. SKD 2019 diselenggarakan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan kepuasan konsumen guna meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik oleh Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Badan Pusat Statistik. SKD 2019 merupakan survei dengan sejumlah 390 responden konsumen yang pernah menerima pelayanan dari unit PST Badan Pusat Statistik baik yang datang langsung ke PST maupun yang tanpa tatap muka seperti melalui telepon, surat, layanan online, dan lain-lain.

Gambar 1.

Hasil Survei Kebutuhan Data 2019 Terkait Data Statistik Kesejahteraan Rakyat.



Sumber: BPS, SKD 2019.

Sebagaimana dapat diamati pada Gambar 1, SKD 2019 memperlihatkan bahwa Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat masuk dalam tiga besar ragam data mikro yang paling banyak dicari oleh konsumen Badan Pusat Statistik. Hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat mendapatkan kepercayaan dari para pengguna data melalui data Susenas, terutama untuk data statistik yang terkait dengan indikator kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain data Susenas juga turut berperan dalam memenuhi kebutuhan pengguna data untuk kepentingan kajian-kajian ilmiah sebagai landasan berbagai kebijakan berbasis bukti.

Ditinjau dari segi kepuasan responden terhadap kualitas Data Statistik Kesejahteraan Rakyat, hasil SKD 2019 menunjukkan capaian 98,89 persen. Dicatat pula tingkat kepuasan konsumen berdasar dimensi kualitas data lainnya yaitu kelengkapan (98,75 persen), akurasi (98,89 persen), dan kemutakhiran (98,89 persen). Kepuasan responden SKD 2019 tersebut didekati dengan pertanyaan tingkat kepuasan terhadap jenis data konsumsi penduduk, rumah tangga, gender, pendidikan, sosial dan budaya, kesejahteraan sosial, kesehatan, serta perumahan dan permukiman.

1.1.2 Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kesra 2015-2019.

Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target indikator kinerja (yang dinyatakan dalam persen) pada masing-masing tujuan maupun sasaran. Indikator kinerja yang diukur merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen perjanjian kinerja (PK) pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2015-2019 dapat diamati pada Tabel 1.

Tabel 1.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Menurut Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator, 2015-2019.

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator	Satuan	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah aktivitas Statistik Kesejahteraan Rakyat yang mempublikasikan nilai akurasi	Aktivitas	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu	Publikasi/ Laporan	95,24	108,70	75,00	120,00	111,11
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang memiliki ISSN/ISBN	Publikasi/ Laporan	90,48	109,09	75,00	120,00	105,56
Jumlah indikator/data terkait dengan kesehatan yang terdapat pada publikasi	Indikator	-	-	100,00	100,00	100,00
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	Persen	99,31	98,66	99,32	102,16	101,66
Jumlah instansi pemerintah dan swasta yang menerima publikasi BPS	Instansi	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00
Jumlah aktivitas Statistik Kesejahteraan Rakyat yang metadatanya terdapat pada SiRusa	Aktivitas	100,00	100,00	100,00	83,33	120,00

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015-2019 (diolah)

Secara rata-rata tahunan, capaian kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015-2019 terlihat hampir selalu mengalami peningkatan. Peningkatan capaian kinerja tersebut, jika ditinjau dari tahun ke tahun nampak mengalami titik terendah pada tahun 2017. Namun demikian, capaian kinerja setelah tahun 2017 terus mengalami peningkatan dan puncaknya adalah pada tahun 2019. Secara rata-rata capaian kinerja tahun 2019 telah mencapai lebih dari 100 persen, hal ini berarti realisasi kinerja pada tahun 2019 telah melampaui seluruh target perjanjian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2019.

Capaian kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015-2019 ditinjau dari tiap tujuan/sasaran strategis/indikator secara umum juga nampak mengalami peningkatan, meskipun capaian kinerja beberapa tujuan/sasaran strategis/indikator nampak fluktuatif dari tahun ke tahun. Capaian kinerja tujuan/sasaran strategis/indikator terendah terjadi pada tahun 2017, yaitu untuk indikator jumlah publikasi/laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang hanya mencapai 75 persen dari target yang ditentukan. Namun demikian, nampaknya tahun 2017 merupakan titik tolak untuk peningkatan capaian yang lebih baik dan terbukti pada tahun-tahun berikutnya dimana capaian kinerja tujuan/sasaran strategis/indikator bahkan mampu mencapai titik maksimal yaitu 120 persen.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Tugas dan fungsi utama Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat adalah melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi berbagai indikator rumah tangga, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan perumahan. Guna menghasilkan berbagai statistik tersebut, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan statistik Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data Susenas semakin dipercaya oleh pemerintah, kementerian, lembaga nasional maupun internasional dan akademisi untuk monitoring capaian indikator-indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs), RPJMN, Nawa Cita, serta berbagai kajian ilmiah yang utamanya digunakan sebagai perencanaan, monitoring, dan evaluasi program-program pembangunan nasional.

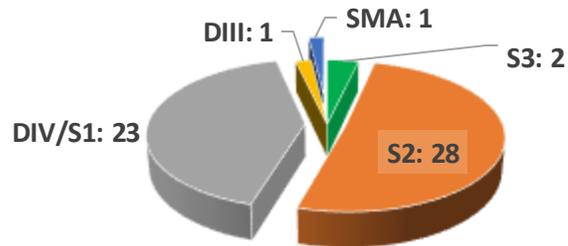
Pengumpulan data Susenas dilakukan sebanyak 2 (dua) periode, yaitu pada bulan Maret (menggunakan kuesioner konsumsi dan pengeluaran serta kuesioner kor) dan pada bulan

September (kuesioner Modul). Cakupan Susenas Maret yang cukup luas (Susenas Maret 2020 sejumlah 325.000 rumah tangga sampel) didesain secara metodologi untuk menyajikan indikator dengan level estimasi nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Selanjutnya Susenas September yang diselenggarakan sebagai Susenas Modul (bergiliran tiap tahun antara modul statistik pendidikan dan kesejahteraan sosial, modul statistik kesehatan dan perumahan, serta modul statistik ketahanan sosial) didesain secara metodologi untuk menyajikan indikator dengan level estimasi indikator nasional dan provinsi.

Fokus utama Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat adalah menyediakan data secara lebih cepat, akurat, dan dengan mudah diakses publik. Kolaborasi kegiatan diseminasi data Susenas bersama berbagai kementerian dan lembaga dapat secara langsung mewujudkan kontribusi data Susenas terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah serta kementerian/lembaga. Selain itu berbagai publikasi baik sesuai target *advance release calendar* (ARC) maupun publikasi tambahan non ARC tahun 2020 yang merupakan olah data hasil survei di tahun yang sama sehingga data yang disajikan terkini pada tahun yang bersesuaian. Berbagai produk Statistik Kesejahteraan Rakyat, terutama publikasi dapat dengan mudah diakses masyarakat luas melalui website Badan Pusat Statistik.

Potensi yang dimiliki Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat berupa sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas adalah sejumlah 55 orang. Sebagaimana disajikan pada Gambar 2, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat didukung oleh SDM dengan rincian pendidikan sebagian besar adalah tamat pendidikan Strata 2 (S2) yaitu sebesar 50,91 persen, dan tamat pendidikan Diploma IV ataupun Strata 1 (S1) yaitu sebesar 41,82 persen. Sumber daya manusia dengan potensi kualitas yang baik ini sangat penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sehari-hari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Gambar 2.
Jumlah Sumber Daya Manusia Pada Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
Menurut Pendidikan, 2020.



Sumber: Website <http://community.bps.go.id> (diakses tanggal 9 Juli 2020)

Selain berbagai potensi yang dimiliki oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Secara umum Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat juga menghadapi berbagai tantangan yang dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kepercayaan terhadap penggunaan data Susenas, memiliki konsekuensi meningkatkan ragam permintaan data Susenas sekaligus meningkatnya perhatian terhadap kualitas data Susenas.
- 2) Peningkatan kualitas data Susenas yang diiringi permintaan data hingga level estimasi terkecil perlu diselaraskan dengan kemajuan teknologi dan ilmu statistika yang semakin berkembang. Hal ini membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang mampu melakukan olah data Susenas yang tersedia hingga level kabupaten/kota.
- 3) Semakin meningkatnya permintaan ragam indikator statistik yang diajukan untuk dapat dimuat dalam Susenas, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat harus dapat memposisikan diri sebagai bagian dari pembina penyelenggaraan statistik untuk kementerian/lembaga di Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari rencana aksi Satu Data Indonesia guna memperkuat penyelenggaraan data sektoral secara mandiri sesuai metode ilmiah oleh kementerian/lembaga.
- 4) Semakin berkembangnya teknologi informasi dan kebutuhan efisiensi terhadap berbagai sumber daya penyelenggaraan survei, menimbulkan tantangan penyelenggaraan survei oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat berbasis teknologi informasi. Diperlukan dukungan

ketersediaan piranti teknologi informasi serta berbagai sumber daya terkait yang memadai untuk mewujudkannya.

- 5) Masih dijumpai responden yang tidak memberikan partisipasi secara maksimal, hal ini berdampak terhadap *response rate*, terutama di masa pandemik Covid-19 memerlukan strategi lebih baik dalam prosedur pendataan Susenas.
- 6) Keterbatasan anggaran terutama menyangkut pengadaan cinderamata untuk responden Susenas dan biaya pendataan lapangan yang sesuai dengan beban kerja Susenas yang tinggi masih merupakan tantangan yang membutuhkan solusi lebih tepat.
- 7) Jadwal pelaksanaan berbagai kegiatan statistik di daerah saling tumpang tindih menimbulkan isu ketersediaan pengajar, petugas lapangan dan petugas entri data yang berkualitas untuk Susenas yang diselenggarakan di seluruh kabupaten/kota.
- 8) Guna meningkatkan pelayanan prima terhadap pengguna output produk Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dan pengguna peran sebagai pembina data, diperlukan standar prosedur untuk para pengguna yang berinteraksi langsung dengan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

2.2 Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

2.3 Tujuan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

2.4 Sasaran Strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat



Bab II. Visi, Misi, dan Tujuan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Visi Indonesia Tahun 2045 yaitu Indonesia Maju. Visi Indonesia Maju dijabarkan dalam misi, dan program pemerintah untuk memastikan pembangunan nasional mencapai Indonesia sebagai negara yang Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. Dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045, ditetapkan empat pilar utama: Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan sangat penting yang akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Target yang ditetapkan dalam RPJPN 2005-2025 adalah pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Arahan Presiden terkait RPJMN Tahun 2020-2024 meliputi 5 (lima) arahan utama yaitu: pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Arahan Presiden tersebut kemudian diterjemahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang memuat program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas. Dengan demikian agenda pembangunan menunjang dalam tercapainya Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” yang diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang selanjutnya disebut sebagai Nawacita ke dua. Selanjutnya secara detail keterkaitan Visi, Misi Presiden 2020-2024 dengan Arahan Presiden, dan Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3.

Keterkaitan Visi, Misi Presiden 2020-2024 dengan
Arahan Presiden, dan Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024



Sumber: Renstra Badan Pusat Statistik 2020-2024

2.1 Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020-2024 adalah:

“Penyedia Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Berkualitas untuk Indonesia Maju”

Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020-2024 telah mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta merupakan wujud peran serta Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam rangka mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia Maju. Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020-2024 juga telah diselaraskan dengan Visi Kedeputan Bidang Statistisik Sosial “Penyedia Data Statistik Sosial Berkualitas untuk Indonesia Maju” dan sesuai dengan Visi Badan Pusat Statistik “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”.

Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan rakyat 2020-2024 menunjang peran Kedeputusan Bidang Statistik Sosial dan peran Badan Pusat Statistik dalam menyelenggarakan peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik dasar berkualitas yang memiliki komparasi standar nasional maupun internasional. Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat juga merupakan perwujudan penguatan peran Badan Pusat Statistik sebagai pembina data statistik yang turut mengupayakan pembinaan data berkualitas untuk kebutuhan data sektoral.

2.2 Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang diselaraskan dengan Misi Kedeputusan Sosial, dan Misi Badan Pusat Statistik. Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat adalah turunan dari Visi dan Misi Badan Pusat Statistik yang merupakan pelaksanaan Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yang ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing), dan yang ke-3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan). Rincian Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik kesejahteraan rakyat berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.
2. Membina Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi terkait bidang statistik kesejahteraan rakyat melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan.
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik kesejahteraan rakyat untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.
4. Membangun sumber daya manusia di Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Tabel 2.

Pernyataan Visi dan Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2024

Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2024	Penyedia Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Berkualitas untuk Indonesia Maju	Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2024
		1. Menyediakan statistik kesejahteraan rakyat berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.
		2. Membina Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi terkait bidang statistik kesejahteraan rakyat melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan.
		3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik kesejahteraan rakyat untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.
		4. Membangun sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020-2024 yang telah dirinci sebelumnya, dapat dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik kesejahteraan rakyat berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.

Peran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat selaras dengan peran Badan Pusat Statistik yaitu sebagai penyelenggara statistik dasar di bidang kesejahteraan rakyat. Statistik dasar dapat diartikan sebagai statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007). Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley, 2009:187). Terdapat 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang selaras dengan kualitas statistik yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik meliputi relevansi (*relevance*), akurasi (*accuracy*), aktualitas (*timeliness*) dan tepat waktu (*punctuality*), *accessibility* (aksesibilitas), koherensi (*coherence*) dan keterbandingan (*comparability*), serta interpretabilitas (*interpretability*). Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

memiliki pedoman yang sama dengan Badan Pusat Statistik yaitu mengacu kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam “*Fundamental Principle of Official Statistics*”.

2. Membina Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi terkait bidang statistik kesejahteraan rakyat melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan

Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan (UU No. 16 Tahun 1997). Badan Pusat Statistik memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral, tentunya hal ini sejalan dengan mandat yang diemban Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral di bidang kesejahteraan rakyat. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat juga mengemban mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah dalam membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Demikian pula diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang merupakan unit di bawah Badan Pusat Statistik, bertindak sebagai pembina data statistik khususnya terkait kesejahteraan rakyat, dengan tugas menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik kesejahteraan rakyat untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat pengguna produk statistik kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan oleh seluruh jajaran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Tidak hanya mencakup kepuasan pengguna pada produk statistik kesejahteraan rakyat, pelayanan prima juga mencakup peran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagai pembina dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang harus mampu memenuhi kebutuhan rujukan data statistik sektoral dan khusus yang diselenggarakan bersama dengan Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi.

4. Membangun sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang unggul dan adaptif tercermin pada citra diri insan statistik yang meliputi nilai inti profesional, integritas, dan amanah. Nilai inti profesional tercermin pada citra diri insan statistik yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas. Selanjutnya citra diri insan statistik berintegritas terlihat pada sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya dengan penuh dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur). Nilai inti amanah tercermin pada setiap tindakan dan sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik.

2.3 Tujuan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Penyelenggaraan kegiatan Badan Pusat Statistik mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Amanat yang diembankan sebagai tugas Badan Pusat Statistik adalah menyelenggarakan statistik dasar yaitu statistik dengan pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, dan makro. Disebutkan pula dalam Undang-Undang tersebut bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional, Badan Pusat Statistik mengemban peran menyelenggarakan kerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat (baik di tingkat pusat maupun daerah) untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Badan Pusat Statistik juga memiliki peran sebagai koordinator dalam kerja sama penyelenggaraan statistik dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas yang diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu. Perwujudan Sistem Statistik Nasional juga merupakan bagian peran Badan Pusat Statistik yang diamanatkan undang-undang.

Tujuan yang ditetapkan oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat merupakan tujuan yang mendukung berbagai peran dan tugas yang diamanatkan oleh Undang-undang terhadap Badan Pusat Statistik. Tujuan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat juga merupakan upaya guna mendukung upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2024. berbagai tujuan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat memuat misi yang ditetapkan sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Tujuan 1: Menyediakan data statistik kesejahteraan rakyat untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan:

- Misi ke-1: Menyediakan statistik kesejahteraan rakyat berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.
2. Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang kesejahteraan rakyat, terkait dengan:
- Misi ke-2: Membina Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi terkait bidang statistik kesejahteraan rakyat melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan.
3. Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang kesejahteraan rakyat, terkait dengan:
- Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik kesejahteraan rakyat untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.
4. Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, terkait dengan:
- Misi ke-4: Membangun sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Tujuan pertama yaitu menyediakan data statistik kesejahteraan rakyat untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan menuntut Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat mendukung Badan Pusat Statistik meningkatkan kualitas data statistik kesejahteraan rakyat dalam rangka menyediakan data statistik kesejahteraan rakyat. Data yang disediakan ini sangat dibutuhkan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan berbasis bukti. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap-CERDAS (*Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia*) dalam kerangka penjaminan kualitas.

Tujuan kedua yaitu meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang kesejahteraan rakyat, memuat misi peningkatan peran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagai pembina data. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat harus mampu menjadi Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya Sistem Statistik Nasional terutama di bidang kesejahteraan rakyat, serta sebagai koordinator penyelenggaraan statistik kesejahteraan rakyat di Indonesia, baik yang

diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Di dalam tujuan kedua ini peran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat mendukung Badan Pusat Statistik sebagai pembina data dalam Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia semakin terlihat.

Tujuan ketiga adalah meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang kesejahteraan rakyat. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan teknologi informasi dan komunikasi guna penyebarluasan hasil penyelenggaraan kegiatan statistik oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Demikian pula peranan pelayanan prima mencakup peran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagai pembina dan penyelenggara Satu Data Indonesia yang harus mampu memenuhi kebutuhan rujukan data statistik sektoral dan khusus yang diselenggarakan bersama dengan Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi.

Tujuan keempat, Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai inti profesionalisme, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan seluruh jajaran di Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat terus dilakukan, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan dan *workshop*.

2.4 Sasaran Strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Kondisi capaian secara nyata oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat pencerminan pengaruh dari adanya *outcome/impact* dari satu atau beberapa program yang dilaksanakan oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dituangkan dalam sasaran strategis. Program Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat terdiri dari program-program teknis yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (pelayanan internal).

Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020 – 2024 disusun dengan berpedoman pada Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2020 – 2024 yang mengikuti arahan Presiden dengan mengikuti *money follow program*. Arahan tersebut berarti adanya sinergi program-program antar Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan arahan visi misi yang

ditetapkan Presiden. Oleh karena itu, dalam Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat termasuk restrukturisasi program sesuai dengan arahan presiden tersebut yang ditujukan untuk menunjukkan nomenklatur program yang dapat menggambarkan *outcome* dalam pencapaian sasaran pembangunan baik pencapaian yang dilakukan oleh satu Kementerian/Lembaga, maupun antar Kementerian/Lembaga (Lintas Kementerian/Lembaga), sesuai dengan kesepakatan dalam restrukturisasi program Badan Pusat Statistik yang terdiri dari: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan (2) Program Dukungan Manajemen.

Gambar 4.

Peta Strategi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2024



Penjabaran Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat juga berpedoman pada penjabaran Misi Badan Pusat Statistik yaitu 4 (empat) misi dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif. Perspektif tersebut antara lain: perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process*, dan perspektif *learning and growth*. Pendekatan ini digunakan agar implementasi dalam pencapaian sasaran strategis dari sistem penganggaran yang dikombinasikan dengan pendekatan pendekatan

penganggaran berbasis kinerja dan *logic model framework* dalam penataan arsitektur kinerja program dan kegiatan menjadi lebih mudah.

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis guna mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang akan diwujudkan pada periode 2020-2024. Sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prespektif *Stakeholder*

Pembangunan Statistik Kesejahteraan Rakyat pada perspektif *stakeholder* memiliki sasaran meningkatnya kepercayaan stakeholder terhadap kualitas data dan pembinaan Statistik Kesejahteraan Rakyat. Indikator Kinerja Utama Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, yang bersesuaian dengan perspektif ini adalah:

- Banyaknya indikator statistik kesra yg digunakan dalam RPJMN/D.
- Banyaknya indikator statistik kesra standar global yg digunakan sebagai indikator SDGs.
- Banyaknya K/L/D/I yg merupakan mitra Direktorat Statistik Kesra yang telah menerapkan standar sesuai SSN (Sistem Statistik Nasional).
- Banyaknya K/L/D/I yang mendapat *technical assistance* dari Direktorat Statistik Kesra.

2. Prespektif *Customer*

Pembangunan Statistik Kesejahteraan Rakyat pada perspektif *customer* memiliki sasaran mewujudkan data dan pembinaan di Bidang Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas. Indikator Kinerja Utama Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang bersesuaian dengan perspektif ini adalah:

- Banyaknya indikator statistik kesra yg digunakan dalam RPJMN/D.
- Banyaknya indikator statistik kesra standar global yg digunakan sebagai indikator SDGs.
- Banyaknya K/L/D/I yg merupakan mitra Direktorat Statistik Kesra yang telah menerapkan standar sesuai SSN (Sistem Statistik Nasional).
- Banyaknya K/L/D/I yang mendapat *technical assistance* dari Direktorat Statistik Kesra.

3. Perspektif *Internal Process*

Pembangunan Statistik Kesejahteraan Rakyat pada perspektif *internal process* memiliki sasaran menerapkan proses bisnis yang efektif dan efisien. Indikator Kinerja Utama Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang bersesuaian dengan perspektif ini adalah:

- Banyaknya indikator statistik kesra yg menyertakan informasi akurasi data (*relative standar error*).

4. Perspektif *Learning and Growth*

Pembangunan Statistik Kesejahteraan Rakyat pada perspektif *learning and growth* memiliki sasaran menyelenggarakan pelatihan berjenjang. Indikator Kinerja Utama Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang bersesuaian dengan perspektif ini adalah:

- Meningkatnya nilai Profesional, Integritas dan Amanah sumber daya manusia di Direktorat Statistik Kesra (berdasar hasil Survei Persepsi Budaya Organisasi BPS).

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAN

- 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Statistik Sosial
- 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat



Bab III. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Statistik Sosial

Arah dan kebijakan strategi Deputi Bidang Statistik Sosial dalam penyediaan data dan informasi statistik merupakan turunan dari arah dan kebijakan strategi BPS yang termaktub dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020, Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020 – 2024.

3.1.1 Arah kebijakan dan Strategi

Arah dan kebijakan Strategi Deputi Bidang Statistik Sosial berfokus pada 3 (tiga) arah dan kebijakan strategi yang dicanangkan oleh BPS yaitu:

1. Menyediakan Data Statistik Sosial untuk Dimanfaatkan sebagai Dasar Pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyediaan data Statistik Sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan yaitu meningkatnya pemanfaatan data statistik sosial yang berkualitas.

Arah kebijakan yang ingin diraih yaitu:

- a. Peningkatan kualitas data statistik sosial
- b. Pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna
- c. Penilaian penjaminan kualitas statistik dasar
- d. Penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar

Strategi yang akan dilakukan untuk dapat mendukung tercapainya arah dan kebijakan ini antara lain:

- a. Meningkatkan akurasi data statistik sosial
- b. Memastikan kemutakhiran data melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan data, penerapan metodologi dengan memanfaatkan teknologi informasi serta penggunaan Big Data untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan
- c. Melakukan koordinasi untuk dapat meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai kaidah dan standard international

- d. Mengembangkan penerapan SAE dalam penyediaan data statistik sosial
 - e. Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral
 - f. Memastikan penggunaan standard dan metodologi data statistik sosial di Indonesia
2. Meningkatnya kolaborasi, Integrasi, dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan SSN
- Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN.
- Arah kebijakan yang ingin diraih yaitu terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI).
- Strategi yang akan dilakukan untuk dapat mendukung tercapainya arah dan kebijakan ini antara lain:
- a. Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina SSN
 - b. Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral di bidang statistik sosial
 - c. Memaksimalkan peran BPS khususnya Deputi Bidang Statistik Sosial untuk Satu Data Indonesia (SDI)
3. Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN
- Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN yaitu penguatan statistik sektoral K/L/D/I.
- Arah kebijakan yang ingin diraih yaitu:
- a. Penguatan implementasi SSN
 - b. Penyediaan statistik sektoral
- Strategi yang akan dilakukan untuk dapat mendukung tercapainya arah dan kebijakan ini antara lain:
- a. Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik
 - b. Melakukan pembinaan statistik sektoral ke K/L/D/I
 - c. Melakukan koordinai dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik sosial
4. Meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi
- Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan tata kelola kelembagaan dan Reformasi Birokrasi adalah penguatan SDM.

Arah kebijakan yang ingin diraih yaitu:

- a. Penguatan tata kelola kelembagaan
- b. Percepatan reformasi birokrasi

Strategi yang akan dilakukan untuk mendukung tercapainya arah dan kebijakan ini antara lain:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan Kedeputian Statistik Sosial melalui berbagai *capacity building* terkait suatu tema.
- b. Penguatan kompetensi pegawai di lingkungan kedeputian Statistik Sosial berdasarkan Human Capital Development Planning yang terpadu, penyelenggaraan *capacity building* berdasarkan Training Need Analysis.
- c. Melakukan pembinaan SDM di lingkungan Kedeputian Statistik Sosial dalam rangka meningkatkan penyajian suatu indikator untuk level wilayah yang lebih kecil dengan cara melaksanakan pelatihan Small Area Estimation.
- d. Melakukan *sharing knowledge* secara rutin antar staf.
- e. Melaksanakan *capacity building* untuk meningkatkan *soft skill* staf di lingkungan Kedeputian Statistik Sosial.
- f. Penguatan kompetensi para fungsional statistisi di lingkungan Kedeputian Statistik Sosial.
- g. Melakukan review terhadap metodologi penghitungan suatu indikator.
- h. Peningkatan penggunaan anggaran di lingkungan Kedeputian Statistik Sosial secara efektif dan efisien.
- i. Peningkatan pengawasan terhadap tata kelola anggaran di lingkungan Kedeputian Statistik Sosial.
- j. Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Kedeputian Statistik Sosial dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pegawai.

Tabel 3.1. Program dan Kegiatan Deputi Bidang Statistik Sosial

Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
T1. Menyediakan data statistik sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS.1. Tersedianya data statistik sosial yang berkualitas	AK.1. Peningkatan kualitas data statistik sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akurasi data 2. Memastikan ketepatan waktu data 3. Melakukan koordinasi untuk dapat meningkatkan kualitas metodologi 4. Mengembangkan penerapan <i>Small Area Estimation</i> (SAE) dalam penyediaan data statistik sosial 	PPIS	Penyediaan dan Pengembangan data: <ol style="list-style-type: none"> 1. Statistik Demografi 2. Statistik Ketenagakerjaan 3. Statistik Upah dan Pendapatan 4. Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 5. Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 6. Statistik Rumah Tangga 7. Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial 8. Statistik Kesehatan dan Perumahan 9. Statistik Ketahanan Wilayah 10. Statistik Lingkungan Hidup 11. Statistik Politik dan Keamanan 12. Statistik Kerawanan Sosial
		AK.2. Penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar	<ol style="list-style-type: none"> 5. Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral 6. Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional 		
T3. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	SS.2. Menguatnya komitmen K/L/D/I terhadap SSN	AK. 3. Terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI)	<ol style="list-style-type: none"> 7. Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina SSN 8. Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral 9. Memaksimalkan peran BPS untuk Satu Data Indonesia (SDI) 		

Tabel 3.1. Program dan Kegiatan Deputi Bidang Statistik Sosial

(lanjutan)

Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional	SS.3. Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I	AK.4. Penguatan implementasi SSN AK.5. Penyediaan statistik sektoral	10. Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik 11. Melakukan pembinaan statistik sektoral ke K/L/D/I 12. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam menghasilkan statistik sosial		

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020 – 2024, Deputi Bidang Statistik Sosial mendukung arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan (mainstreaming). Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan bidang statistik tahun 2020 – 2024 antara lain:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Deputi Bidang Statistik Sosial berkomitmen dalam pelaksanaan target TPB dengan mendukung pemenuhan ketersediaan data terhadap indikator statistik sosial. Selain sebagai penyedia data, Deputi Bidang Statistik Sosial berperan dalam mengawal K/L lain dalam penyediaan indikator TPB

2. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender diberbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender lama pembangunan statistik sosial. Strategi yang dilakukan Deputi Bidang Statistik Sosial antara lain:

- a. Menghasilkan ukuran statistik terpilah jenis kelamin guna mendukung evaluasi kebijakan berbasis gender di berbagai bidang pembangunan
- b. Memasukan perspektif gender dalam survei yang dilakukan
- c. Memberikan peran yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan dalam pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan statistik
- d. Memberikan akses yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan dalam mengambil kesempatan melanjutkan ke kuliah/sekolah, kursus, dan pelatihan

3. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Salah satu survei di Bidang Statistik Sosial terkait modal sosial budaya yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSPB) yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Pengumpulan data terkait kebudayaan merujuk pada Framework for Cultural Statistics (FCS) yang sudah dikembangkan oleh Unesco pada tahun 2009 dan UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

4. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Aspek pemanfaatan teknologi komputasi dilakukan dalam kegiatan statistik seperti big data dan mobile computing.

3.1.2 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dijalankan di lingkungan Deputi Statistik Sosial adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) yang mencakup pada kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit Eselon II di lingkungan Deputi Statistik Sosial dan dilaksanakan juga di BPS Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Sosial bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat dan ketahanan sosial. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, Deputi Bidang Statistik Sosial secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan serta pengkajian data dan informasi statistik sosial.

Dalam pelaksanaan kegiatan pokok tersebut dijabarkan menjadi beberapa komponen-komponen yang menjadi tanggung jawab masing-masing eselon II (direktorat) di lingkungan Kedeputian Bidang Statistik Sosial dan ada beberapa yang dilaksanakan juga di BPS Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Kegiatan di Kedeputian Bidang Statistik Sosial yang sesuai dengan Program Penyediaan dan Pelayanan Statistik (PPIS) antara lain:

1. Penyediaan dan pengembangan data Statistik Demografi
2. Penyediaan dan pengembangan data Statistik ketenagakerjaan
3. Penyediaan dan pengembangan data Statistik Upah dan Pendapatan
4. Penyediaan dan pengembangan data Statistik Mobilitas dan Tenaga Kerja
5. Penyediaan dan pengembangan data Statistik Rumah Tangga
6. Penyediaan dan pengembangan data Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial
7. Penyediaan dan pengembangan data Statistik Kesehatan dan Perumahan

8. Penyediaan dan pengembangan data Statistik Ketahanan Wilayah
9. Penyediaan dan pengembangan data Statistik Lingkungan Hidup
10. Penyediaan dan pengembangan data Statistik Politik dan Keamanan
11. Penyediaan dan pengembangan data Statistik Kerawanan Sosial

3.1.3 Prioritas Nasional

Terdapat 7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional yang merupakan Prioritas Nasional (PN) periode tahun 2020 – 2024. Deputi Bidang Statistik Sosial memiliki kegiatan penyediaan data statistik yang mendukung PN diantaranya:

1. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020)
Pelaksanaan SP2020 mendukung PN 1 yaitu Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. PN yang berkaitan dengan Deputi Bidang Statistik Sosial adalah Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan.
2. Pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Pelaksanaan Sakernas mendukung PN 3 yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing.
3. Pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Pelaksanaan Susenas mendukung PN 1 yaitu Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, PN 3 yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing serta PN 4 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
4. Pelaksanaan Pendataan Potensi Desa (Podes)
Pelaksanaan Pendataan Podes mendukung PN 2 yaitu infrastruktur dan pemerataan wilayah.
5. Penyusunan Statistik Keamananan
Pelaksanaan penyusunan statistik keamanan mendukung PN 7 yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
6. Survei Prilaku Anti Korupsi (SPAK)
Pelaksanaan SPAK mendukung PN 7 yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public
7. Survei Demokrasi Indonesia

Pelaksanaan Survei Demokrasi Indonesia mendukung PN 7 yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Misi pertama Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yaitu menyediakan data statistik kesejahteraan rakyat berkualitas yang berstandar nasional dan internasional memiliki tujuan menyediakan data statistik kesejahteraan rakyat untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan. Dengan sasaran strategis tersedianya data statistik kesejahteraan rakyat yang berkualitas, arah kebijakan yang ditentukan adalah:

1. Peningkatan kualitas data statistik kesejahteraan rakyat.
2. Penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral di bidang Kesra agar memenuhi kriteria standar.

Strategi yang ditetapkan untuk Data Statistik Kesejahteraan Rakyat berkualitas yang berstandar nasional dan internasional adalah:

1. Menerapkan standar dalam *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM) dalam melakukan kegiatan statistik kesejahteraan rakyat.
2. Memastikan penggunaan standar yang sesuai dengan konsep nasional dan internasional dalam menyelenggarakan statistik kesejahteraan rakyat.
3. Memastikan kemutakhiran data statistik kesejahteraan rakyat.
4. Melakukan koordinasi untuk dapat meningkatkan kualitas metodologi data statistik kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan penerapan *Small Area Estimation* (SAE) dalam penyediaan data statistik kesejahteraan rakyat.
6. Pemanfaatan *Big Data* dalam mendukung penyediaan data statistik kesejahteraan rakyat.
7. Melaksanakan penjaminan kualitas pada penyelenggaraan kegiatan statistik dasar dan statistik sektoral/khusus oleh K/L/D/I di bidang kesejahteraan rakyat.

Misi ke dua Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam membina K/L/D/I terkait bidang statistik kesejahteraan rakyat melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan memiliki tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) di bidang kesejahteraan rakyat. Dengan sasaran strategis menguatnya

komitmen K/L/D/I terkait Kesra terhadap SSN, arah kebijakan yang ditentukan adalah Terwujudnya SSN di bidang kesejahteraan rakyat melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI).

Strategi yang ditetapkan untuk pembinaan K/L/D/I terkait bidang statistik kesejahteraan rakyat melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan adalah:

1. Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina SSN di bidang kesejahteraan rakyat.
2. Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral di bidang kesejahteraan rakyat
3. Memaksimalkan peran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung peran BPS untuk mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI) di bidang kesejahteraan rakyat

Misi ke tiga Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yaitu Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik kesejahteraan rakyat untuk terwujudnya SSN memiliki tujuan Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang kesejahteraan rakyat. Dengan sasaran strategis Menguatnya statistik sektoral terkait Kesra di K/L/D/I, arah kebijakan yang ditentukan adalah:

1. Penguatan implementasi SSN di bidang kesejahteraan rakyat.
2. Penyediaan statistik sektoral di bidang kesejahteraan rakyat.

Adapun berbagai strategi yang ditetapkan untuk pelayanan prima di bidang statistik kesejahteraan rakyat untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional adalah:

1. Membina stakeholder dalam produksi kegiatan data sektoral di Bidang Statistik Kesra yang memenuhi standar GSBPM.
2. Melakukan pembinaan statistik sektoral maupun statisik khusus di K/L/D/I di Bidang Kesra.
3. Melakukan koordinasi dengan K/L/D/I dalam menghasilkan statistik dasar Bidang Kesra yang berkualitas.

Misi ke empat Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yaitu membangun sumber daya manusia Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah memiliki tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi. Dengan sasaran strategis Meningkatnya sumber daya manusia yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai professional, integritas, dan amanah, arah kebijakan yang

ditentukan adalah Penguatan kompetensi pegawai di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Adapun berbagai strategi yang ditetapkan untuk pelayanan prima di bidang statistik kesejahteraan rakyat untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional adalah:

1. Penguatan kompetensi pegawai di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat melalui penyelenggaraan capacity building pengembangan sebanyak 20 jam pelajaran/tahun bagi setiap pegawai.
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pejabat fungsional statistisi dalam mewujudkan peran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagai pembina data statistik kesejahteraan rakyat.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

4.2 Kerangka Pendanaan



Bab IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1 Target Kinerja

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2024 disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik. Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama periode 5 (lima) tahun. Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat disusun sebagai rujukan dalam menyusun rencana kegiatan tahunan, melaksanakan, memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi tugas dan fungsi unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2024 disusun sesuai dengan tugas, pokok, fungsi, dan kewenangan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2024 juga disusun dengan mengacu terhadap dukungan tercapainya RPJMN 2020-2024, Renstra Badan Pusat Statistik 2020-2024, dan Renstra Kedepuyan Bidang Statistik Sosial 2020-2024. Guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2024 adalah sebagaimana terlampir pada Tabel 3.

Tabel 3.
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2024

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
T1. Menyediakan data statistik kesejahteraan rakyat untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.						
SS1. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas.						
Banyaknya indikator statistik kesra yg menyertakan informasi akurasi data (<i>relatif standar error</i>)	indikator					
Banyaknya indikator statistik kesra yg digunakan dalam RPJMN/D	indikator					
Banyaknya indikator statistik kesra yg digunakan sebagai indikator SDGs standar global	indikator					
T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang kesejahteraan rakyat.						
SS2. Meningkatnya Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I di Bidang Kesejahteraan Rakyat.						
Banyaknya K/L/D/I yang mendapat technical assistance dari Direktorat Statistik Kesra	K/L/D/I	-	4	5	6	7
T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang kesejahteraan rakyat.						
SS3. Meningkatnya Penguatan Komitmen K/L/D/I di Bidang Kesejahteraan Rakyat terhadap Sistem Statistik Nasional.						
Banyaknya K/L/D/I mitra Direktorat Statistik Kesra yg telah menerapkan standar sesuai SSN (Sistem Statistik Nasional)	K/L/D/I	-	1	2	3	4
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.						
SS4. Meningkatnya SDM di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesional integritas dan amanah.						
Meningkatnya Nilai Profesional, Integritas dan Amanah SDM di Direktorat Statistik Kesra (berdasar hasil Survei Persepsi Budaya Organisasi BPS)	satuan	11.90	11.95	12.00	12.05	12.10

4.2 Kerangka Pendanaan

Guna merealisasikan pencapaian tujuan, sasaran strategis, indikator dan target kinerja, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2024 Rincian memerlukan dukungan ketersediaan anggaran yang cukup dan tepat guna. Dalam mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel diperkirakan kebutuhan biaya untuk tiap program dan kegiatan tahun 2020-2024 sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.

Tabel 4.

Indikasi Kebutuhan Pendanaan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2024

Program/Kegiatan/Output/ Indikator Output	Alokasi Anggaran Kegiatan (dalam juta rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
54.01.06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik					
Kegiatan 2906: Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat)					
2906.003: Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Terbit Tepat Waktu	14.740	15.881	20.176	17.163	17.890
2906.100: Laporan Pembinaan Statistik Sektoral	-	50,00	51,75	53,57	55,44



BAB V
PENUTUP



Bab V. Penutup

Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2024 disusun sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2024 juga disusun dengan mengacu terhadap dukungan tercapainya RPJMN 2020-2024 dan Renstra Badan Pusat Statistik 2020-2024. Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat merupakan rujukan dalam menyusun rencana kegiatan tahunan, melaksanakan, memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi tugas dan fungsi unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Wujud dukungan Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam tercapainya RPJMN 2020-2024 adalah menyediakan data statistik dasar di bidang kesejahteraan rakyat sebagai basis bukti dalam penyusunan perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbagai program pembangunan nasional. Dukungan Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat terhadap Renstra Badan Pusat Statistik 2020-2024 dengan penigkatan kualitas dari bisnis inti (*core business*) Badan Pusat Statistik adalah fokus terhadap:

1. Penyediaan data statistik kesejahteraan rakyat yang berkualitas.
2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik kesejahteraan rakyat.
3. Pembinaan dan koordinasi di bidang statistik kesejahteraan rakyat dalam kerangka sistem statistik nasional.

Tujuan dan Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagai upaya guna mendukung upaya pencapaian visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2024 yaitu “Penyedia Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Berkualitas untuk Indonesia Maju” adalah:

5. Tujuan 1: Menyediakan data statistik kesejahteraan rakyat untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan:

Misi ke-1: Menyediakan statistik kesejahteraan rakyat berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.

6. Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang kesejahteraan rakyat, terkait dengan:
 - Misi ke-2: Membina Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi terkait bidang statistik kesejahteraan rakyat melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan.
7. Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang kesejahteraan rakyat, terkait dengan:
 - Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik kesejahteraan rakyat untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.
8. Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, terkait dengan:
 - Misi ke-4: Membangun sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi perlu didukung dengan budaya kerja yang efektif dan efisien untuk menghasilkan kinerja tinggi berlandaskan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik yakni profesionalisme, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS 2020 – 2024 ini dapat diwujudkan sehingga mampu memberikan dukungan maksimal terhadap kesuksesan capaian kinerja Badan Pusat Statistik dan berdampak pula kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN periode 2020 – 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti seluruh insan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat bagi kemajuan pembangunan guna terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta, 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-1, Fax: (021)3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> Email: bpshq@bps.go.id